



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/298/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.



**RENCANA KERJA
(RENJA)
BIRO ADMINISTRASI PEMBAGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan suatu proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Biro Administrasi Pembangunan sebagai unit kerja staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu aktivitas untuk meningkatkan kapasitas Biro Administrasi Pembangunan selaku unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran kinerja sesuai tupoksi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini juga untuk menjalankan tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta pengendalian kegiatan (berupa monitoring dan evaluasi) sebagai umpan balik (*feed back*) perencanaan berikutnya. Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi antar Biro dan yang terkait pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang.

Disadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini masih belum dapat menyentuh semua kepentingan karena berbagai keterbatasan. Namun ke depan akan diupayakan secara lebih akomodatif. Oleh karena itu, saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, Februari 2023

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,



ZAINURI, S.H., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196907101991031007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I P E N D A H U L U A N	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	11
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD	14
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	15
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	21
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....	21
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
BAB V P E N U T U P.....	31

DAFTAR TABEL

Hal.

TABEL 2.1	REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022.....	7
TABEL 2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	13
TABEL 2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	16
TABEL 3.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	23
TABEL 4.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan dokumen rencana resmi daerah yang didalam penyusunan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta berpedoman kepada Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bersifat indikatif berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keselarasan perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah serta mewujudkan visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran ke depan sebagai pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan tupoksi secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Reformasi Birokrasi diselenggarakan berlandaskan amanat Peraturan Perundang-undang meliputi :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan ke depan yaitu tahun 2024, mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan (2024), serta sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan datang.

Tujuan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah untuk menentukan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi instansi dengan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bersifat indikatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I **PENDAHULUAN**; terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024.

- BAB II **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**; terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu: Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Tahun Lalu (2022) dan perkiraan capaian RENSTRA PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.
- BAB III **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**; telaahan terhadap kebijakan nasional dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran RENJA Biro Administrasi Pembangunan serta Program Kegiatan.
- BAB IV. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**. Bab ini memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta tentang Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana.
- BAB V. **PENUTUP**. Merupakan gambaran tentang hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Renja-PD Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun 2022 dengan pagu sebesar **Rp. 3.256.175.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 0
- Belanja Langsung : Rp. 3.256.175.000,00

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 di Biro Administrasi Pembangunan tidak ada, sedangkan Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.2.890.676.029,00 atau 88,78% dari anggarannya sebesar Rp.3.256.175.000,00 dan Realisasi Fisik sebesar 92,02%.

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 (Dua) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Adapun hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2022 adalah Honorarium SDDKN pada sub kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah tidak dapat direalisasikan.

Pagu Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2022 sebesar **Rp.3.256.175.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 0
- Belanja Langsung : Rp. 3.256.175.000,00

Target Penyerapan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Triwulan I sebesar	Rp.	651.235.000,00	(20%)
2. Triwulan II sebesar	Rp.	976.852.500,00	(30%)
3. Triwulan III sebesar	Rp.	1.139.661.250,00	(35%)
4. Triwulan IV sebesar	Rp.	488.426.250,00	(15%)

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari 2 (Dua) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan, dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 di Biro Administrasi Pembangunan tidak ada.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 ditampilkan pada Tabel Lampiran 2.1.

(Tabel 2.1)

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan SOPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		5 Kegiatan	1.294.691.700			5 Kegiatan	1.424.161.300
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan		10 Dokumen	30.188.300			10 Dokumen	33.207.100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	8.472.000	PAD		2 Dokumen	9.319.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1.980.000	PAD		1 Dokumen	2.178.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	2.381.300	PAD		1 Dokumen	2.619.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	2.904.000	PAD		1 Dokumen	3.194.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	3.274.300	PAD		1 Dokumen	3.601.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKIP, LKPJ, dan LPPD	Kota Palangka Raya	3 Laporan	3.412.700	PAD		3 Laporan	3.754.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	7.764.000	PAD		1 Dokumen	8.540.400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan		2 Laporan	18.472.300			2 Laporan	20.319.550
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	3.601.500	PAD		1 Laporan	3.961.650
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	14.870.800	PAD		1 Laporan	16.357.900
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor		1 tahun	420.662.700			1 tahun	462.728.950
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	146.670.000	PAD		1 tahun	161.337.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	1 tahun	40.811.400	PAD		1 tahun	44.892.450
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	233.181.300	PAD		1 tahun	256.499.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Tahun	779.455.600			1 Tahun	857.401.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan Internet	Kota Palangka Raya	1 tahun	181.264.500	PAD		1 tahun	199.390.950
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	13 unit	241.969.500	PAD		13 unit	266.166.450
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	1 tahun	356.221.600	PAD		1 tahun	391.843.800

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif
1	2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	5 27 unit	6 45.912.800	7	8	9 30 unit	10 50.504.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	Kota Palangka Raya	13 unit	20.405.800	PAD		13 unit	22.446.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palangka Raya	35 unit	25.507.000	PAD		35 unit	28.057.700
2	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporan dan Data Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang tepat waktu		100%	2.093.701.200			100%	2.303.071.900
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		80 Dokumen	1.243.701.200			80 Dokumen	1.368.071.900
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Dokumen	403.975.800	PAD		12 Dokumen	444.373.400
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Dokumen	221.220.600	PAD		12 Dokumen	243.342.700
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Provinsi Kalimantan Tengah	56 Dokumen	618.504.800	PAD		56 Dokumen	680.355.800
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		12 Dokumen	850.000.000			12 Dokumen	935.000.000
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	4 Dokumen	250.000.000	PAD		4 Dokumen	275.000.000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	4 Dokumen	250.000.000	PAD		4 Dokumen	275.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif
1	2 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	3 Jumlah Dokumen Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Provinsi Kalimantan Tengah	5 4 Dokumen	6 350.000.000	7 PAD	8 4	9 4 Dokumen	10 385.000.000
Jumlah			3.388.392.900						3.727.233.200

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2022 mengelola beberapa kegiatan strategis diantaranya :

1. Aplikasi SDDKN merupakan aplikasi dari Kementerian Sekretariat Negara untuk menyediakan data/informasi dalam menggambarkan keadaan pembangunan di daerah yang sesungguhnya dalam rangka memberikan dukungan teknis kepada presiden/wakil presiden, pimpinan K/L dan Kepala Daerah. Sistem ini menyajikan data informasi tentang pembangunan daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dengan prosentase capaian sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 80,25% dari target 100% diukur dari jumlah penyampaian data yang disampaikan oleh SOPD Provinsi maupun vertikal;
2. Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA). Jumlah persentase capaian realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 88,05% (Rp4.349.348.565.122) untuk realisasi keuangan dan 91,79% untuk realisasi fisik dari target 100% dan Jumlah persentase capaian realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 87,42% (Rp.15.606.157.198.567) untuk realisasi keuangan dan 90,94% untuk realisasi fisik dari target 100%. Jumlah persentase capaian realisasi fisik dan keuangan APBN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 96,28% (Rp. 535.489.987.234) untuk realisasi keuangan dan 99,88% untuk realisasi fisik dari target 100% dan jumlah persentase capaian realisasi fisik dan keuangan APBN Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 70,12% (Rp.88.516.904.495) untuk realisasi keuangan dan 70,12% untuk realisasi fisik dari target 100%.

3. kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I,II dan III se-Kalimantan Tengah

Pada tahun 2021 persentase capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, II dan III se-Kalimantan Tengah adalah sebesar 99,8%. Indikator kinerja ini membandingkan antara realisasi kegiatan fisik dengan total keseluruhan kegiatan fisik se Kalimantan Tengah tahun 2021.

4. Evaluasi Capaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi dan nontender/nonseleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar 95,86% dari target 100% dihitung dari jumlah paket yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah paket yang direncanakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditampilkan pada Tabel Lampiran 2.2.

(Tabel 2.2)

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK (PP- 6/2008)	Target Renstra Biro					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	12	13
1	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah			100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	
3	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah			90%	95%	98%	100%	100%	95,86	98%	
4	Persentase capaian target dan realisasi keuangan APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah										
	Persentase capaian target dan realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah										
	Persentase capaian target dan realisasi keuangan APBN Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah										
	Persentase capaian target dan realisasi keuangan APBN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah										
5	Persentase capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD dan APBN strategis dan non-strategis pada Wilayah I, II, dan III se-Kalimantan Tengah										
6	Persentase capaian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tender/seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah										
	Persentase capaian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui nontender/nonseleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah										

Catatan :
1. SPM = Standar Pelayanan Minimum
2. IKK = Indikator Kinerja Kunci

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tak bisa lepas dari isu-isu penting utamanya. Beberapa isu tersebut, yaitu:

- ✓ Terlaksananya Himpunan laporan dan pengendalian kegiatan pembangunan yang dimulai sejak tahun 2008 dan terus berlanjut.
- ✓ Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana DAK, APBD, APBN untuk Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan tengah maupun di Kabupaten/Kota yang sinergi dengan program strategis nasional yang disalurkan dari kementerian ke instansi teknis

Adapun yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu, semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan belum tersedianya sistem dan prosedur kerja yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki peluang dalam meningkatkan pelayanannya yaitu tersedianya teknologi informasi yang memadai dalam mendukung kinerja.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi nya, terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

1. Tujuan pengendalian perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dan rencana dari Biro Administrasi Pembangunan kurang tercapai
2. Permintaan target pelaksanaan program kegiatan yang meningkat tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas peningkatan kinerja, perbaikan kualitas perencanaan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan

- 3. kurangnya pemahaman tentang tupoksi yang baik dan benar sehingga pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target yang diharapkan.
- 4. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan jumlah dan kompetensinya dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dalam menyusun rancangan awal RKPD adalah dengan cara memperhitungkan kemungkinan terjadinya kenaikan harga-harga barang maupun jasa sehingga rancangan awal RKPD tersebut disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan, adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD 2023 dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dituangkan dalam tabel Lampiran 2.3.

(Tabel 2.3)

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		1.181.256	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		1.181.256	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan	10 Dokumen	29.943	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan	10 Dokumen	29.943	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	8.472	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	8.472	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	1.980	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	1.980	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	2.310	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	2.310	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	2.904	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	2.904	

No	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	3.168	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	3.168	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan LKIP, LPPD	3 Laporan	3.345	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan LKIP, LPPD	3 Laporan	3.345	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	7.764	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	7.764	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	2 Laporan	18.178	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	2 Laporan	18.178	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	1 Laporan	3.601	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	1 Laporan	3.601	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Biro Administrasi Pembangunan	1 Laporan	14.577	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Biro Administrasi Pembangunan	1 Laporan	14.577	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor	1 Tahun	407.769	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor	1 Tahun	407.769	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	143.777	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	143.777	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	40.811	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	40.811	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	223.181	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	223.181	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	679.454	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	679.454,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Tersedianya Jaringan Internet	1 Tahun	181.264	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Tersedianya Jaringan Internet	1 Tahun	181.264	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 unit	141.969	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 unit	141.969	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	356.221	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	356.221	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit	45.912	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit	45.912	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	2 Unit	20.405	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	2 Unit	20.405	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25.507	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25.507	
2	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporan dan Data Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang tepat waktu	100%	2.140.373	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Jumlah Dokumen Kebijakan Administrasi Pembangunan	6 Dokumen	2.140.373	
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 Dokumen	1.054.778	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1.054.778,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Dokumen	355.007	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Dokumen	355.007,00	12
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Dokumen	216.862	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Dokumen	216.862,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	56 Dokumen	482.909	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	56 Dokumen	482.909,00	
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	12 Dokumen	1.085.595	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	12 Dokumen	1.085.595	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen	132.600	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen	132.600,00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	132.600	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	132.600,00	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Dokumen	820.395	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Dokumen	820.395,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada setiap dilakukan Musrenbang oleh Bappedalitbang dan hal-hal strategis, sesuai kemampuan perencanaan keuangan daerah lebih diakomodir secara bertahap sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dilakukan monitoring evaluasi dan juga koordinasi capaian saat Rakordal per triwulan.

Untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2023 di Biro Administrasi Pembangunan tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan kebijakan nasional yang dimaksud untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional yang telah didukung dan dilaksanakan daerah, sehingga penentuan arah kebijakan provinsi kateng sejalan dengan yang dituju oleh kebijakan nasional.

Kebijakan nasional yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran rencana kerja Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran daerah yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa.
2. Ketersediaan sistem pelayanan publik dan meningkatnya kemampuan koordinasi terhadap dinas dan lembaga daerah.
3. Ketersediaan standarisasi pembangunan daerah.
4. Ketersediaan acuan perencanaan pembangunan daerah.
5. Peningkatan progres realisasi keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah melalui tugas fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
6. Melakukan koordinasi dan monitoring evaluasi atas dana sektoral/APBN, DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan bahwa tujuan renja Biro Administrasi Pembangunan dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Tujuan Utama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah yang tertib, akuntabel dalam

melayani masyarakat / publik, melalui Program Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Utama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Meningkatnya cakupan layanan dalam pelaporan baik analisis maupun pengkajian kebijakan pembangunan yang bersumber dari dana pusat dan daerah.
2. Optimalnya / optimalisasi sistem perencanaan maupun pengendalian program.
3. Efektifnya pemanfaatan dan pengelolaan data informasi pembangunan.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang tujuan dan sasaran pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 yang juga diharapkan berlanjut pada Tahun 2024, maka Biro Administrasi Pembangunan telah merencanakan program dan kegiatan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya pencapaian target dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan implementasi yang tertuang dalam rencana kegiatan strategis tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) sub kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Strategis SOPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel Lampiran 3.1.

(Tabel 3.1)

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Strategis SOPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporan dan Data Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang tepat waktu		100%	2.093.701.200			100%	2.475.485.415
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		80 Dokumen	1.243.701.200			80 Dokumen	1.368.071.900
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Dokumen	403.975.800	PAD		12 Dokumen	444.373.400
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Dokumen	221.220.600	PAD		12 Dokumen	243.342.700
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Provinsi Kalimantan Tengah	56 Dokumen	618.504.800	PAD		56 Dokumen	680.355.800
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		12 Dokumen	850.000.000			12 Dokumen	1.107.413.515
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	4 Dokumen	250.000.000	PAD		4 Dokumen	135.265.000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	4 Dokumen	250.000.000	PAD		4 Dokumen	135.265.000
	Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	4 Dokumen	350.000.000	PAD		4 Dokumen	836.883.515
	Jumlah				2.093.701.200,00				2.475.485.415,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, masa bakti Tahun 2021-2026 dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

**“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat,
Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”**

Untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan Administrasi Pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Tugas Utama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Membangun Pelayanan Aparatur Pemerintah yang memenuhi azas tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam melayani masyarakat / publik di Provinsi Kalimantan tengah.

Sejalan dengan visi Gubernur tersebut Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak tang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan rutin maupun kegiatan yang baru pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 yang juga diharapkan berlanjut pada Tahun 2025, maka Biro Administrasi Pembangunan telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan total anggaran tahun 2024 sebesar Rp3.388.392.900,00- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), dalam upaya bagi pencapaian target dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2023 mencakup 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Program dan Kegiatan SOPD Tahun 2024 dan Prakiraan
Maju Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel Lampiran 4.1.

(Tabel 4.1.)

Tabel 4.1
**Rencana Program dan Kegiatan SOP Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025**
Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		5 Kegiatan	1.294.691.700			5 Kegiatan	1.424.161.300
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan		10 Dokumen	30.188.300			10 Dokumen	33.207.100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	8.472.000	PAD		2 Dokumen	9.319.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1.980.000	PAD		1 Dokumen	2.178.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	2.381.300	PAD		1 Dokumen	2.619.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	2.904.000	PAD		1 Dokumen	3.194.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	3.274.300	PAD		1 Dokumen	3.601.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKIP, LKPJ, dan LPPD	Kota Palangka Raya	3 Laporan	3.412.700	PAD		3 Laporan	3.754.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	7.764.000	PAD		1 Dokumen	8.540.400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator	Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana / Pagu indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan		2 Laporan	18.472.300			2 Laporan	20.319.550	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	3.601.500	PAD		1 Laporan	3.961.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Biro Administrasi Pembangunan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	14.870.800	PAD		1 Laporan	16.357.900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor		1 tahun	420.662.700			1 tahun	462.728.950	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	146.670.000	PAD		1 tahun	161.337.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	1 tahun	40.811.400	PAD		1 tahun	44.892.450	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	233.181.300	PAD		1 tahun	256.499.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Tahun	779.455.600			1 Tahun	857.401.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan Internet	Kota Palangka Raya	1 tahun	181.264.500	PAD		1 tahun	199.390.950	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	13 unit	241.969.500	PAD		13 unit	266.166.450	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	1 tahun	356.221.600	PAD		1 tahun	391.843.800	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator	Sumber dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator
1	2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	5 27 unit	6 45.912.800	7	8	9 30 unit	10 50.504.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	Kota Palangka Raya	13 unit	20.405.800	PAD		13 unit	22.446.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palangka Raya	35 unit	25.507.000	PAD		35 unit	28.057.700
2	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporan dan Data Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang tepat waktu		100%	2.093.701.200			100%	2.303.071.900
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		80 Dokumen	1.243.701.200			80 Dokumen	1.368.071.900
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Dokumen	403.975.800	PAD		12 Dokumen	444.373.400
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Dokumen	221.220.600	PAD		12 Dokumen	243.342.700
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Provinsi Kalimantan Tengah	56 Dokumen	618.504.800	PAD		56 Dokumen	680.355.800
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		12 Dokumen	850.000.000			12 Dokumen	935.000.000
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	4 Dokumen	250.000.000	PAD		4 Dokumen	275.000.000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	4 Dokumen	250.000.000	PAD		4 Dokumen	275.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	4 Dokumen	350.000.000	PAD		4 Dokumen	385.000.000
		Jumlah			3.388.392.900				3.727.233.200

BAB V

PENUTUP

Menelaah tupoksi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, terdapat beberapa hal yang cukup *visioner* dalam hal fungsi biro tersebut, yaitu mencakup adanya amanat yang sangat kuat dari Pemerintah Daerah dalam rangka memfokuskan bidang-bidang pembangunan daerah di Kalimantan Tengah untuk mencapai target-target pembangunan pada tataran makro / bidang, bukan hanya tataran mikro yaitu program dan kegiatan sejalan dengan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Selanjutnya juga tupoksi tersebut memberikan instrumen tambahan bagi upaya penyelenggaraan tugas aparatur pemerintah melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu adanya pendayagunaan teknologi dan sistem informasi sebagai sarana penunjang pencapaian kinerja. Tujuan utama dalam hal pendayagunaan teknologi informasi ini adalah mewujudkan terintegrasinya informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka sinergisme dan harmonisasi kinerja pemerintah daerah.

Palangka Raya, Februari 2023

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,


ZAINURI, S.H., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196907101991031007